

SEJARAH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Sekretariat Jenderal
4. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
6. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
7. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
8. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
9. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
10. Inspektorat Jenderal
11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
12. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
13. Staf Ahli

26 Oktober
Keputusan Presiden Nomor 355/M:
Mengangkat Menteri Eksplorasi Laut

10 November
Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999:
Membentuk Departemen Eksplorasi Laut (DEL)

1 Desember
Keputusan Presiden Nomor 145:
Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi
Laut dan Perikanan

Keputusan Presiden Nomor 147:
Perubahan nomenklatur DEL menjadi Departemen
Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP)

23 November

- Keputusan Presiden Nomor 165:
Perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP)

- Keputusan Presiden Nomor 177:
Susunan Organisasi dan Tugas Departemen
 1. Menteri Kelautan dan Perikanan
 2. Sekretaris Jenderal
 3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 5. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 6. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran
 7. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 8. Inspektorat Jenderal
 9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
 10. Staf Ahli

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 dan Nomor 94 Tahun 2006:

Perubahan struktur organisasi

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektorat Jenderal
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Kelautan dan Perikanan
7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
11. Staf Ahli

Peraturan Presiden
Nomor 47:

Perubahan nomenklatur
dari Departemen Kelautan
dan Perikanan (DKP)
menjadi Kementerian
Kelautan dan
Perikanan (KKP)

Peraturan Presiden
Nomor 63:
Menambahkan
Inspektorat Jenderal
sebagai unsur
pengawasan internal
kementerian

1999

2000

2005-2006

2009

2015

2025

2024

2023

2017

Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 2:

- Pemisahan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang
Laut menjadi:
 1. Direktorat Jenderal Penataan
Ruang Laut
 2. Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan

Keputusan Presiden Nomor 73/M:
Pengangkatan Wakil Menteri
Negara Kabinet Merah Putih
Periode Tahun 2024–2029

Peraturan Presiden Nomor 38:

- Penyesuaian nomenklatur
 1. Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 2. Perikanan Budi Daya
 3. Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 4. Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
- Fungsi riset dan inovasi dialihkan kepada
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Fungsi Karantina Ikan dialihkan kepada
Badan Karantina Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 2:

- Penyesuaian nomenklatur:
1. Pengelolaan Ruang Laut
 2. Perikanan Budidaya
 3. Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan
dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan
dan Perikanan
 4. Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan